

TAJUK RENCANA

Tantangan Hilirisasi Prabowo

PRESIDEN Prabowo kini sedang dalam lawatan ke luar negeri. residen Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke beberapa negara dengan tujuan utama Mempererat hubungan bilateral dan multilateral

Prabowo mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris untuk bertemu dengan para pemimpin negara tersebut dalam politik dunia dan mempererat hubungan bilateral. Kehadiran di forum-forum ini penting untuk menyuarakan kepentingan Indonesia di kancah internasional.

Presiden Prabowo menekankan kunjungan-kunjungan tersebut memiliki nilai strategis dan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Salah satu tujuan penting dari kunjungan itu adalah untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Membina hubungan baik dengan negara lain, diharapkan mampu memicu datangnya investor asing ke dalam negeri.

Investasi inilah yang diharapkan mampu mendukung program hilirisasi, yang masuk dalam program utama seperti dikemukakan dalam pidato petamanya.

Seperti diketahui, Presiden menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mencapai kemakmuran dan mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Program hilirisasi dalam konteks kabinet merah putih mengacu pada program pengembangan industri hilir untuk berbagai komoditas unggulan Indonesia.

Presiden berencana melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia.Beberapa komoditas yang akan dihilirisasi antara lain nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

Hilirisasi dalam kabinet baru merupakan kelanjutan dan perluasan dari program yang telah dimulai pada era pemerintahan sebelumnya, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah

komoditas domestik dan pengembangan industri hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program hilirisasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8%.

Program hilirisasi dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia melalui beberapa cara, antara lain menciptakan lapangan kerja baru. Proses hilirisasi membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan terlatih, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Hilirisasi mengolah produk mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, meningkatkan harga jual dan daya saing. Misalnya, hilirisasi nikel meningkatkan keuntungan Indonesia dari 2,1 miliar dollar AS menjadi 33,8 miliar dollar AS

Untuk mencapai hal tersebut, tentu tidak mudah. Program hilirisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang dapat menghambat implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Antara lain adalah SDM. Sebab Indonesia membutuhkan sekitar 16.000 tenaga kerja kompeten setiap tahunnya untuk mendukung. Keterbatasan SDM yang terampil dapat menghambat pengembangan industri hilir yang memerlukan keahlian khusus.

Untuk menarik investasi, kita perlu memiliki kebijakan yang ramah terhadap investor, termasuk insentif yang menarik dan perizinan yang efisien. Ketidakpastian dalam kebijakan dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi dalam proyek hilirisasi.

Hilirisasi juga memerlukan infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat proses produksi dan distribusi produk hilir.Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memulai melakukan hal tersebut karena itu harus diteruskan.

Dinamika politik global dan perubahan kebijakan di negara lain dapat mempengaruhi pasar ekspor produk hilirisasi Indonesia. Tekanan dari negara-negara lain untuk tidak menerapkan kebijakan tertentu juga menjadi tantangan. Tapi ini harus dihadapi bersama. (***)-d

ASPD Menguatkan Literasi

Rudy Prakanto

memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, dan menjadi dasar para penguku kepentingan melakukan intervensi kebijakan terhadap sekolah.

ASPD yang dilaksanakan di seluruh sekolah jenjang SD/MI, dan SMP/MTs di DIY bertujuan untuk 1). Mengembangkan kompetensi siswa, 2). Menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran, 3). Memantau perkembang-



KR-JOKO SANTOSO

an mutu dan kesenjangan antarbagian di sistem pendidikan, dan 4). Dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Secara nyata, ASPD akan mengukur kemampuan minimal individu siswa dalam hal literasi membaca, numerasi, sains serta bahasa. Dengan ASPD ini diharapkan para siswa memiliki kemampuan literasi yang semakin tinggi. Kemampuan Literasi Membaca, Numerasi, Sains dan Bahasa sangat penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan di proses belajarnya.

Hasil ASPD

Hasil dari ASPD, bersifat mengukur kemampuan literasi membaca, numerasi, sains, dan bahasa dengan soal-soal yang dikerjakan siswa bersifat ter-

apan, dan penalaran. Oleh karena itu guru di sekolah harus membiasakan siswa gemar membaca, berhitung, bernalar kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dalam proses belajarnya.

Melalui ASPD terbukti mampu mendorong para siswa untuk belajar. Hal ini dibuktikan dengan perolehan PISA DIY tahun 2022 tertinggi di tingkat nasional. Skor PISA DIY untuk literasi membaca adalah 401, literasi numerasi 408, dan literasi sains 420. Hasil PISA DIY ini setara bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Kamboja dan Philipina.

Hasil ASPD juga dapat memberikan informasi akurat dan dapat memantau terkait dengan akses pendidikan berkualitas, proses pembelajaran bermutu, serta standar evaluasi yang tepat dan bervariasi untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan peningkatan kualitas sekolah dapat terpantau dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan intervensi lebih terarah, berbasis data, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Maka ASPD sejatinya inovasi unggulan daerah yang harus terus didukung sebagai sarana pemerintah daerah melayani masyarakatnya.

***)Rudy Prakanto SPd Meng,**
Kepala Balai Tekhkomdik Disdikpora DIY dan Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Wijono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Yogyakarta, 55232, Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklnankryk23@yahoo.com, iklnankryk13@gmail.com.

Langanan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232, Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedri Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Aturan Pencatatan Nama pada Data Kependudukan

Ghuftron Su’udi

NAMA bagi seseorang merupakan hal yang penting, baik dari segi hukum, budaya, dan bahkan agama. Dari segi hukum nama berfungsi sebagai identitas diri, mulai dari transaksi hukum, hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum. Adapun dari segi budaya, nama memiliki makna dan tujuan yang sangat mendalam, ada harapan, spiritualitas, dan berbagai makna filosofis. Sementara dari segi agama, selain menjadi identitas spiritual nama juga berfungsi sebagai do’a dan bukti ketaatan kepada Tuhan.

Dari berbagai motif pemberian nama inilah negara hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus sebagai pemenuhan hak konstitusional serta tertib administrasi kependudukan. Pada tahun 2022 pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam penulisan dan pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Prinsip Pencatatan Nama

Permendagri Nomor 73 ini secara umum memuat tiga hal pokok, yaitu prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan hendaknya dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan nama yang sesuai norma agama berarti nama yang akan dicatatkan hendaknya sebuah nama yang tidak hanya memiliki makna yang baik, tetapi juga mengikuti ketentuan atau ajaran agama yang dianut.

Pencatatan nama juga harus memperhatikan norma kesopanan, yaitu memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, nama tersebut tidak boleh mengandung unsur yang tidak pantas, penghinaan, atau dapat menyinggung perasaan orang lain. Karena nama memiliki dampak sosial dan psikologis ba-

gi pemiliknya, maka pencatatan nama juga harus didasarkan pada norma kesusilaan. Nama hendaknya mencerminkan sebuah kehormatan, menghindari kata-kata yang mengandung makna negatif, tidak sopan, atau merendahkan martabat seseorang.

Syarat dan Tata Cara

Di antara syarat pencatatan nama pada dokumen kependudukan adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Demikian juga dari segi jumlah huruf dan kata yang dibatasi. Ketentuan mudah dibaca bertujuan agar orang lain mudah menyebut atau mengenali nama tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki nama "Bbxtt" atau nama lain yang terdiri dari beberapa huruf yang sulit dibaca atau diucapkan, akan menimbulkan kebingungan atau kesalahan dalam pengucapan. Adapun yang dimaksud sebuah nama tidak boleh bermakna negatif adalah nama yang memiliki konotasi negatif atau buruk serta dapat menimbulkan asosiasi yang tidak menyenangkan.

Adapun ketentuan "tidak multitafsir" mempunyai bentuk beragam, di antaranya nama yang terdiri dari satu huruf, disingkat, atau nama yang menurut kebiasaan bukan untuk nama diri seseorang, seperti nama lembaga negara, istilah yang menunjukkan sebuah pangkat atau jabatan. Sementara untuk jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Sedang tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan ditentukan sebagai berikut, pertama harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kedua tidak boleh disingkat, kecuali ti-

dak diartikan lain, artinya boleh disingkat tetapi harus konsisten dengan singkatan tersebut.

Contoh, seseorang bernama Abdul Ghofar. Apabila pemohon menginginkan namanya disingkat menjadi Abd Ghofar dibolehkan, tetapi selamanya bernama Abd Ghofar. "Abd" di sini tidak dianggap lagi sebagai singkatan, tetapi sudah menjadi nama.

Ketiga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, seperti menggunakan angka sebagai pengganti huruf. Contoh, huruf "A" pada nama Ahmad ditulis "4hm4d", dan sebagainya. Demikian juga penggunaan semua tanda baca, seperti tanda baca apostrop (-) pada nama Su’udi. Pada akta pencatatan sipil juga dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Yang dimaksud akta pencatatan sipil di sini antara lain akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. (*)-d

***)Ghuftron Su’udi SAg, Penghulu Madya Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Umbulharjo dan Ketua Asosisasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Kota Yogyakarta.**

Pojok KR

Disdikpora DIY luncurkan program seniman masuk sekolah.

- Supaya generasi muda tak melupakan budaya sendiri.

Modus baru, ganja jadi selai roti.

- Kita semua harus lebih ketat mengawasi.

Jateng dan Jatim, hadapi persoalan netralitas Pilkada.

- Bawaslu musti lebih kenceng memantau.